



Kolaborasi Buku Eureka

AKUNTANSI

SEKTOR PUBLIK

**Kathleen Asyera Risakotta | Dwi Ekasari Harmadji | Defriko Gusma Putra
Dwi Winarni | Ana Sopanah | Yanti Murni | Chairani Adelina
Payamta | Ferlinda Ainur Rachmani**

Editor:

Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M., RSA., CPRM.

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor privat atau akuntansi komersial diartikan sebagai akuntansi yang berhubungan dengan perusahaan/organisasi, akuntansi sektor publik/akuntansi pemerintahan diartikan sebagai akuntansi yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan/*nonprofit*. Terdapat tiga bidang dalam akuntansi, yaitu (1) akuntansi komersial, (2) akuntansi pemerintahan dan (3) akuntansi sosial. Akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan digolongkan pada akuntansi mikro, dilihat dari bentuknya perseorangan, badan usaha, organisasi non laba dan pemerintahan. Sedangkan akuntansi sosial digolongkan sebagai akuntansi makro, karena bentuknya lembaga atau negara yang mana untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi pada suatu daerah/negara.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Akuntansi Sektor Publik ataupun siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh. Terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai Akuntansi Sektor Publik.

Bab yang dibahas dalam buku ini meliputi:

- Bab 1 Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik
- Bab 2 Sejarah Akuntansi Sektor Publik
- Bab 3 Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik
- Bab 4 Akuntansi Manajemen Publik
- Bab 5 Penganggaran Sektor Publik
- Bab 6 Pengukuran Kinerja
- Bab 7 Laporan Keuangan Pemerintahan
- Bab 8 Audit Sektor Publik
- Bab 9 Akuntansi Untuk Tempat Ibadah



eureka
media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/UTE/2021

☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



ECC00202397378



AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kathleen Asyera Risakotta, S.E., M.Sc.
Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M.
Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.
Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.
Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA.
Yanti Murni, S.E., M.M.
Chairani Adelina, S.E., M.Si.
Dr. Payamta, CPA, M.Si., Ak. CA, CPI, CGRPCA, CRA, CRP,
Asean CPA
Ferlinda Ainur Rachmani, S.E., M.Ak., Ak.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis : Kathleen Asyera Risakotta, S.E., M.Sc.
Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M.
Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.
Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.
Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA.
Yanti Murni, S.E., M.M.
Chairani Adelina, S.E., M.Si.
Dr. Payamta, CPA, M.Si., Ak. CA, CPI,
CGRPCA, CRA, CRP, Asean CPA
Ferlinda Ainur Rachmani, S.E., M.Ak., Ak.

Editor : Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M., RSA., CPRM.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Via Maria Ulfah

ISBN : 978-623-151-623-7

No. HKI : EC00202397378

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2023

**Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Kolaborasi Buku Eureka**

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik
perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami ucapkan kehadiran ALLAH SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Akuntansi Sektor Publik.

Pembahasan dalam buku ini meliputi Konsep Dasar Akuntansi Sektor Publik, Sejarah Akuntansi Sektor Publik, Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Manajemen Publik, Penganggaran Sektor Publik, Pengukuran Kinerja, Laporan Keuangan Pemerintahan, Audit Sektor Publik, dan Akuntansi Untuk Tempat Ibadah.

Pembahasan materi dalam buku ini telah disusun secara sistematis dengan tujuan memudahkan pembaca. Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah Akuntansi Sektor Publik ataupun siapa saja yang ingin mendalami lebih jauh. Terbitnya buku ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai Akuntansi Sektor Publik.

Penulis merasa bahwa Buku Akuntansi Sektor Publik ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih bagi kepastakaan di Indonesia dan bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga , September 2023

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB 1 KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	2
C. Organisasi Sektor Publik	2
D. Peran Akuntansi dalam Organisasi Sektor Publik.....	8
E. Entitas dalam Akuntansi Sektor Publik.....	8
F. Elemen-Elemen Akuntansi Sektor Publik.....	10
G. Kesimpulan.....	14
H. Daftar Pustaka	14
I. Tentang Penulis.....	15
BAB 2 SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	16
A. Pendahuluan	16
B. Sejarah Akuntansi Sektor Publik	16
C. Sejarah Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.....	18
D. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik.....	24
E. Kesimpulan.....	26
F. Daftar Pustaka	26
G. Tentang Penulis.....	28
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	29
A. Pendahuluan	29
B. Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik.....	29
C. Tujuan dan Peran Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik.....	30
D. Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	31
E. Penerapan Karakteristik Kualitatif Akuntansi Sektor Publik.....	37
F. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik.....	40
G. Kesimpulan.....	43

	H. Daftar Pustaka.....	46
	I. Tentang Penulis	47
BAB 4	AKUNTANSI MANAJEMEN PUBLIK.....	49
	A. Pendahuluan.....	49
	B. Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Perencanaan.....	50
	C. Akuntansi Manajemen Sebagai Alat Pengendalian.....	52
	D. Proses Perencanaan dan Pengendalian	54
	E. Kesimpulan	62
	F. Daftar Pustaka.....	63
	G. Tentang Penulis	64
BAB 5	PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK	65
	A. Pendahuluan.....	65
	B. Perencanaan Pembangunan.....	66
	C. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)	74
	D. Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)	79
	E. Perencanaan Pembangunan Jangka Pendek (RKPD)	80
	F. Kesimpulan	91
	G. Daftar Pustaka.....	92
	H. Tentang Penulis	93
BAB 6	PENGUKURAN KINERJA	94
	A. Pendahuluan.....	94
	B. Pengukuran Kinerja	98
	C. Kesimpulan	105
	D. Daftar Pustaka.....	107
	E. Tentang Penulis	109
BAB 7	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN.....	110
	A. Pendahuluan.....	110
	B. Tujuan Laporan Keuangan.....	111
	C. Dasar Hukum Pelaporan Keuangan.....	112
	D. Asumsi Dasar	112
	E. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	113
	F. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.....	114
	G. Komponen Laporan Keuangan Pemerintahan	116
	H. Kesimpulan	131
	I. Daftar Pustaka.....	131

J. Tentang Penulis.....	132
BAB 8 AUDIT SEKTOR PUBLIK.....	133
A. Pendahuluan	133
B. Pengertian Audit Sektor Publik	134
C. Audit Laporan Keuangan Historis oleh BPK.....	153
D. Obyek Pemeriksaan Keuangan Negara	160
E. Proses Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah	161
F. Pemeriksaan Keuangan Negara Berbasis Risiko	163
G. Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Kap Atas Nama Undang-Undang.....	176
H. Kode Etik Auditor Keuangan Negara	178
I. Kesimpulan.....	185
J. Daftar Pustaka	186
K. Tentang Penulis.....	188
BAB 9 AKUNTANSI UNTUK TEMPAT IBADAH.....	190
A. Pendahuluan	190
B. Pengertian Akuntansi untuk Tempat Ibadah	190
C. Akuntansi Isak 35.....	192
D. Daftar Pustaka	202
E. Tentang Penulis.....	202

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Sektor Publik dan Sektor Privat	2
Tabel 2. Karakteristik Organisasi Sektor Publik.....	4
Tabel 3. Elemen/Istilah dalam Organisasi Publik.....	6
Tabel 4. Penjelasan Elemen Akuntansi Sektor Publik	13
Tabel 5. Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik.....	32
Tabel 6. Batasan Ruang Lingkup Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik	36
Tabel 7. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	118
Tabel 8. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	120
Tabel 9. Format Neraca Pemerintah.....	122
Tabel 10. Laporan Operasional.....	128
Tabel 11. Laporan Arus Kas.....	129
Tabel 12. Format Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Siklus Akuntansi Sektor Publik.....	10
Gambar 2. Proses Perumusan Strategi	59

BAB

1

KONSEP DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Kathleen Asyera Risakotta, S.E., M.Sc.
Universitas Pattimura Ambon

A. Pendahuluan

Akuntansi sektor privat atau akuntansi komersial diartikan sebagai akuntansi yang berhubungan dengan perusahaan/organisasi, akuntansi sektor publik/akuntansi pemerintahan diartikan sebagai akuntansi yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan/*nonprofit*. Terdapat tiga bidang dalam akuntansi, yaitu (1) akuntansi komersial, (2) akuntansi pemerintahan dan (3) akuntansi sosial (Sugijanto, Gunardi and Loho, 1995). Akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan digolongkan pada akuntansi mikro, dilihat dari bentuknya perseorangan, badan usaha, organisasi non laba dan pemerintahan. Sedangkan akuntansi sosial digolongkan sebagai akuntansi makro, karena bentuknya lembaga atau negara yang mana untuk mengumpulkan dan melaporkan data keuangan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi pada suatu daerah/negara.

Untuk pertama kalinya istilah “sektor publik” dikenalkan tahun 1952. Saat itu, sektor publik sebagai bagian dari manajemen ekonomi makro (Mardiasmo, 2009). Luasnya ruang lingkup organisasi pemerintahan seperti perguruan tinggi, rumah sakit, organisasi politik, organisasi massa, dan lainnya (Mardiasmo, 2009). Perbedaan antara organisasi sektor publik dan sektor privat terletak pada tujuan, karakteristik, struktur dan proses, serta lingkungan operasional. Dalam hal

Elemen Akuntansi Sektor Publik	Penjelasan
	melihat hubungan asersi dengan kriteria, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.
Pertanggungjawaban Publik	Pertanggungjawaban publik dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada pemberi amanat. Misalnya, menyampaikan LPJ Bupati kepada DPRD, dan menyampaikan LPJ ketua yayasan kepada dewan penyantunnya.

Sumber: (Bastian, 2015)

G. Kesimpulan

Dilihat dari sistem dan lingkungannya, Akuntansi sektor publik memiliki kekhasannya sendiri. Karakteristik dari organisasi publik adalah karakteristik yang rumit, kompleks, berpolitis dan kaku. Hal ini memengaruhi organisasi pemerintah dan memengaruhi organisasi lainnya, seperti tempat peribadahan, partai politik, dan lainnya. Akuntansi sektor publik hadir sebagai solusi dalam mengatasi masalah kelangkaan sumber daya organisasi publik untuk dapat dikelola secara efisien, efektif, dan ekonomis demi pelayanan publik yang semakin baik.

H. Daftar Pustaka

- Bastian, I. (2015) *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Christensen (2007) *Organization Theory and the Public Sector*. New York: Taylor & Francis Group.

- Halim, A. and Kusufi, S. (2012) *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo (2009) *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Ritonga, I.T. (2010) *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Sugijanto, Gunardi, R.H. and Loho, S. (1995) *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba*. Malang: Brawijaya Press.

I. Tentang Penulis



Kathleen Asyera Risakotta, S.E., MSc.
Universitas Pattimura Ambon

Penulis lahir di Ambon, 23 Juni 1991. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon. Penulis menyelesaikan Pendidikan pada program Sarjana (S1) di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura dan melanjutkan pada program Pasca Sarjana (S2) di Magister Sains Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang akuntansi sektor publik, akuntansi keperilakuan dan akuntansi keuangan. Penulis memiliki beberapa artikel ilmiah yang terpublikasi pada jurnal terakreditasi.

BAB 2

SEJARAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M.
Universitas Wisnuwardhana Malang

A. Pendahuluan

Pemahaman dalam bab ini bertujuan agar para pembaca mampu untuk: 1. Memberikan penjelasan mengenai sejarah akuntansi sektor publik; 2. Memberikan penjelasan mengenai sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia; 3. Memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup akuntansi sektor publik;

B. Sejarah Akuntansi Sektor Publik

Sektor akuntansi mencakup perkembangan publik dan evolusi praktik akuntansi yang digunakan dalam sektor pemerintahan dan organisasi nirlaba. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah akuntansi sektor publik:

1. **Zaman Kuno:** Pada zaman kuno, seperti Mesir Kuno dan Romawi, pemerintahan memiliki sistem pencatatan untuk mengelola aset dan pendapatan publik. Namun, konsep-konsep akuntansi modern belum ada.
2. **Abad Pertengahan:** Pada periode ini, beberapa pemerintah dan organisasi keagamaan menggunakannya.
3. **Revolusi Industri dan Pertumbuhan Sektor Publik:** Pada abad ke-18 dan ke-19, dengan berkembangnya pemerintahan modern dan pertumbuhan sektor publik, kebutuhan akan akuntansi yang lebih rinci dan transparan mulai muncul. Sistem pencatatan ganda (*double-entry*) mulai

E. Kesimpulan

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, maka Indonesia juga menghadapi tantangan baru dalam mengelola akuntansi sektor publik, seperti perlunya mengamankan data keuangan negara dan mendorong transparansi melalui platform digital. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kapasitas para akuntan sektor publik dan meningkatkan kualitas laporan keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dari masa kolonial hingga saat ini, dengan berbagai perubahan regulasi dan praktik. Indonesia terus berupaya untuk memperbaiki transparansi, akuntabilitas, dan manajemen keuangan sektor publik agar sesuai dengan tuntutan zaman dan standar internasional.

F. Daftar Pustaka

- Harmadji, D. E. (2021). *Akuntansi Keuangan Lanjutan Baru* (1st ed.). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Harmadji, D. E., Aryawati, N. P. A., Pancawati, N. L. P. A., Kartini, E., Saputra, B. W., Rahayuningsih, S., Hidayati, C., Trihastuti, A., & Pandin, M. Y. R. (2022). *Akuntansi Manajemen* (1st ed.). Jawa Tengah: Tahta Media Group.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik* (3rd ed.). UII Press.
- Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan Transparansi Dari Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- Mardiasmo, M. (2018). *Buku Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru* (1st ed.). Andi, Yogyakarta.
- Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1(5), 1-15.
- Suryanto, S. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Agregasi (Aksi Reformasi Govenrment Dalam Demokrasi)*, 6(2), 17-29.

<https://accounting.binus.ac.id/2021/11/19/selayang-pandang-perkembangan-akuntansi-pemerintahan-di-indonesia/> diunduh pada tgl. 20-8-2023 pukul 19.00 WIB.

G. Tentang Penulis



Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M.M., CA., CPA
Universitas Wisnuwardhana Malang

Penulis berhasil meraih gelar Sarjana Akuntansi dengan gelar Akuntan pada Tahun 1995 dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi, Universitas Padjadjaran Bandung dan langsung diterima bekerja di perusahaan swasta di Jakarta sebagai *Junior Accountant Staff* selama 6 bulan. Lalu diterima bekerja di PT. Bank Dagang Negara (Persero) Tahun 1996 sd 1999. Lanjut bekerja di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang. Kemudian di Oktober Tahun 2014 mengajukan *resign* dari Bank Mandiri. Tahun 2015 menjadi dosen tetap di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Wisnuwardhana Malang, serta aktif sebagai peneliti di Bidang Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Sektor Publik. Hasil penelitiannya dimuat di jurnal nasional maupun jurnal internasional serta menghasilkan dua buku yang sudah ber-ISBN yaitu: Buku Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dan Buku Tanya Jawab Soal Akuntansi Keuangan Menengah. Tulisannya juga dimuat di Buku Seri Bunga Rampai Akuntansi Publik Edisi 2 dengan judul: Isu Kontemporer Akuntansi Publik yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik. Berhasil meraih gelar Magister Manajemen Tahun 2001 dan Tahun 2020 berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Program Doktor Ilmu Akuntansi FEB Universitas Brawijaya Malang. Email Penulis: dwi.ekasari.harmadji@gmail.com.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.
Universitas PGRI Sumatera Barat

A. Pendahuluan

Pelaksanaan dan pengembangan praktik akuntansi yang baik membutuhkan pedoman dalam penerapannya yang disebut dengan kerangka konseptual akuntansi sektor publik. Menurut Kharisma (2014) pihak-pihak atau *stakeholder* yang membutuhkan informasi akuntansi sangat beragam dan memerlukan informasi yang berbeda pula. Sehingga dalam memenuhi keperluan seluruh stakeholder maka diperlukan kerangka konseptual akuntansi sektor publik yang lengkap atau komprehensif. Kerangka konseptual akuntansi sektor publik tidak hanya menjadi panduan dalam tataran akuntansi sektor publik namun juga dapat memandu jalannya praktek akuntansi sektor publik.

B. Definisi Kerangka Konseptual Akuntansi Sektor Publik

Kerangka konseptual akuntansi sektor publik dibuat oleh sebuah komite perumus standar yang independen dan digunakan sebagai referensi bagi komite perumus, penyusun laporan keuangan, dan pemeriksa untuk menyelesaikan masalah yang belum diatur secara eksplisit dalam pernyataan standar akuntansi sektor publik. Konsep dasar yang digunakan untuk menyusun dan menerapkan siklus akuntansi sektor publik dikenal sebagai kerangka konseptual sektor publik (Mardiasmo, 2021). Konsep-konsep ini mencakup penetapan

ini. Alternatifnya, transaksi tersebut dapat menyebabkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi keuangan.

Kewajiban diakui di neraca saat asal daya tersedia buat mewujudkan kepentingan ekonomi buat menuntaskan kewajiban kini dan jumlah penyelesaian bisa ditentukan secara tangguh. dalam praktiknya, kewajiban kontraktual yang belum dipenuhi oleh ke 2 belah pihak di umumnya tidak diakui sebagai kewajiban dalam laporan keuangan pemerintah. namun, kewajiban tersebut dapat memenuhi definisi liabilitas selama kriteria pengakuan terpenuhi. Pengakuan liabilitas menunjuk di pengakuan aset atau beban terkait.

Ekuitas Diakui dan ditampilkan pada neraca Bila suatu pos merupakan batasan hukum atau batasan lain atas kemampuan organisasi buat menggunakan kapital. penjabaran ini jua bisa menyebutkan informasi bahwa pihak pemilik yang tidak selaras pada suatu organisasi memiliki hak yang tidak sinkron sehubungan dengan penerimaan dividen atau pengembalian kapital.

Pendapatan berdasarkan peningkatan manfaat ekonomi masa depan yang didapatkan dari peningkatan aset atau penurunan kewajiban diakui pada laporan laba rugi dan bisa diukur menggunakan tangguh. Ini berarti bahwa pendapatan diakui pada waktu yang sama menggunakan pengakuan kenaikan aset atau penurunan kewajiban.

Biaya meliputi penurunan manfaat ekonomi masa depan menjadi dampak berasal penurunan aset atau peningkatan liabilitas diakui dalam laporan laba rugi keuangan pada ketika terjadinya serta bisa diukur menggunakan tangguh. Ini berarti bahwa biaya, mirip penyusutan aset tetap dan tunjangan hak karyawan diakui pada waktu yang sama dengan kenaikan kewajiban atau penurunan aset.

H. Daftar Pustaka

- Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. Umsida Press, 1-197.
Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. Lingkup

Akuntansi Sektor Publik, 1-52.

- Aulia, F., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4(2), 64-73.
- Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep Dan Mengapa Penting Dalam Sektor Publik Dan Swasta (Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan). *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 19(1), 1-34.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Mu'am, A. (2015). Basis AkruaI dalam Akuntansi Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(1), 38-46.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

I. Tentang Penulis



Defriko Gusma Putra, S.E., M.Ak.
Universitas PGRI Sumatera Barat

Penulis Lahir di Padang tanggal 18 Agustus 1990 lulusan Universitas Negeri Padang Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada tahun 2012. Menjadi Praktisi di bidang Audit Internal pada beberapa perusahaan swasta nasional dari tahun 2013 sampai 2021. Pada tahun 2018 melanjutkan studi pada Program Magister Ilmu Akuntansi Universitas Andalas dan lulus pada tahun 2020. Saat ini aktif menulis buku dan artikel ilmiah pada jurnal nasional dan internasional serta aktif dalam

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai Dosen pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas PGRI Sumatera Barat dari tahun 2022 sampai sekarang.

BAB 4

AKUNTANSI MANAJEMEN PUBLIK

Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.
Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

A. Pendahuluan

Bab ini berkaitan dengan aspek manajemen organisasi publik dan peran yang harus dijalankan oleh akuntansi manajemen. Seringkali topik strategi lebih dipentingkan dalam organisasi dibandingkan dengan pembahasan manajemen operasi. Strategi yang komprehensif dan dapat dicapai sangat penting pada organisasi publik maupun swasta, adanya manajemen operasi yang buruk dalam suatu organisasi dapat menyebabkan kegagalan untuk mencapai tujuan strategisnya. Dengan demikian, manajemen operasi yang efektif adalah komponen kunci dari manajemen di sektor bisnis maupun di sektor publik. Akuntansi manajemen publik terkait dengan pemberian informasi kepada pihak intern organisasi dan laporannya bersifat prospektif yang digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Tujuan utama akuntansi manajemen publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Selain itu, akuntansi manajemen dalam organisasi publik memiliki peran memberikan informasi akuntansi yang relevan dan andal untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian

jujur, integritas, objektif dan penuh akurat yang dapat menjadikan laporan sangat dipercaya oleh pemegang kepentingan public. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang digunakan manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Pada dasarnya akuntansi manajemen sektor publik berbeda dengan akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif yang digunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sedangkan, akuntansi keuangan memberikan informasi yang bersifat laporan historis dan retrospektif, yaitu berupa laporan kinerja masa lalu. Secara umum, elemen-elemen perencanaan di sektor publik dapat dibagi menjadi strategi akuntansi sebagai alat perencanaan dan strategi akuntansi sebagai alat pengendalian. Domain akuntansi manajemen publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik Negara dan daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi massa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi nirlaba lainnya.

F. Daftar Pustaka

- Budding, T., Grossi, G. and Tagesson, T. (2014) 'Public sector accounting', *Public Sector Accounting*, pp. 1-178. doi: 10.4324/9781315848389.
- Djamhuri, A. and Mahmudi (2006) 'New Public Management, Accounting Reform, and Institutional Perspective of Public Sector Accounting in Indonesia', *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 8(3), pp. 301-321.
- Hong, H. K. (1991) 'Management Accounting in the Public Sector', *International Journal of Public Sector Management*, 4(3), pp. 5-17. doi: 10.1108/09513559110145029.
- Jones, R. (2010) *Public Sector Accounting. 6th Editions Ch. 4 & 5*.
- Prowle, M. J. (2020) *Management Accounting in Public Service Decision Making, Management Accounting in Public Service Decision Making*. doi: 10.4324/9780429430466.

G. Tentang Penulis



Dwi Winarni, S.E., M.Sc., Ak.

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP)

Penulis adalah Dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Penulis menyelesaikan S-1 Akuntansi di FE UMP dan S-2 di Program Magister Sains Akuntansi FEB Universitas Gadjah Mada (UGM) serta menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED). Selain mengajar, juga melakukan penelitian di bidang akuntansi yang sudah diterbitkan pada beberapa jurnal nasional dan internasional. Ketertarikan pada aktivitas sosial menjadikannya melakukan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, diantaranya tentang Literasi keuangan untuk anak-anak, literasi keuangan untuk ibu rumah tangga, literasi keuangan untuk UMKM, Manajemen strategi pengelolaan wisata, Pengembangan potensi desa wisata sebagai sarana pemulihan perekonomian. Buku pertama yang telah diterbitkan berjudul Konservatisme Akuntansi, buku kedua berjudul teori akuntansi dan buku Literasi keuangan Syariah untuk UMKM menjadi buku ketiganya. Kepedulian pada dunia akademik dan sosial memotivasi untuk terus berkarya dan menjadi pribadi menebar manfaat kebaikan. Email: dwiwinarni@ump.ac.id

BAB 5

PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA.
Prodi Akuntansi FEB Universitas Widayagama Malang

A. Pendahuluan

Penganggaran adalah proses perencanaan, penaksiran, dan alokasi sumber daya (seperti uang, tenaga kerja, waktu, dan bahan) untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu organisasi, perusahaan, atau proyek. Hal ini penting dalam manajemen keuangan, baik untuk sektor publik maupun swasta (Sopanah et al., 2023). Tujuan dari penganggaran adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan (Fitri et al., 2023). Penganggaran membantu organisasi atau perusahaan mengidentifikasi prioritas, mengendalikan pengeluaran, menghindari pemborosan, dan memberikan panduan dalam pengambilan keputusan keuangan (Mardiasmo, 2018). Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan, pengalokasian, dan pengendalian sumber daya keuangan oleh pemerintah atau lembaga sektor publik untuk mencapai tujuan-tujuan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur dan mengelola dana publik agar digunakan secara efisien dan efektif dalam menyediakan layanan publik, mendukung program pemerintah, dan membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain. Proses penganggaran sektor publik biasanya terjadi pada tingkat pemerintah pusat (nasional) dan juga pada tingkat pemerintah daerah (provinsi,

Penganggaran sektor publik adalah proses perencanaan pembangunan daerah yang di mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Jangka Pendek yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Perencanaan penganggaran daerah sangat penting dalam manajemen keuangan, baik untuk sektor publik maupun swasta. Penganggaran adalah Penganggaran sektor publik sangat penting bagi pemerintah atau lembaga sektor publik (Sopannah et al., 2023). Tujuan dari penganggaran adalah untuk memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan (Fitri et al., 2023).

G. Daftar Pustaka

- Fitri, S. A., Fadilah, N., Agusti, M. D., Janna, M., Putri, F. R., Jeniva, N. W., . . . Adriansyah. (2023). *Akuntansi Organisasi Nirlaba*. Sada Kurnia Pustaka.
- Haryanto, A. T., & Siswanta. (2023). *Teori Pembangunan*. Unisri Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, (1945).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (2004a).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, (2004b).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2004c).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (2007).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (2006).
- Sopannah, A., & Harnovinsah. (2023). *Perencanaan Pembangunan*

Daerah Teori Dan Implementasi. Scopindo Media Pustaka.
Sopannah, A., Hasan, K., Putra, S. K., & Rusdianti, I. S. (2023).
Akuntabilitas publik organisasi nirlaba. Scopindo Media Pustaka.

H. Tentang Penulis



Dr. Ana Sopannah, SE., M.Si., Ak., CA., CMA.
Prodi Akuntansi FEB Universitas Widyagama Malang

Penulis adalah Dosen di Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Widyagama Malang. Menyelesaikan Program S 1 Akuntansi di Universitas Widyagama Tahun Lulus 2021 dan Master of Science (M.Si) dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun Lulus 2003, Pendidikan Profesi Akuntan di Tempuh di STIE Malang Kucecwara Tahun Lulus 2013, dan ketiganya dengan Predikat Cumlaude, Pada tahun 2013 menyelesaikan Program Doktor Ilmu Akuntansi di Universitas Brawijaya Malang. Selain menjadi Dosen, Ana juga aktif di berbagai organisasi profesi dan terlibat langsung sebagai pengurus di dalamnya. Seperti, Ketua Forum Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi (FAME) Wilayah Jawa Timur, Vice President Certified Management Accountant (CMA) Indonesia, Bidang Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP), dan Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Wilayah Malang Raya. Selain aktif sebagai dosen, Ana juga aktif di kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai Pengurus LPNU dan Forhati Jawa Timur.

BAB 6

PENGUKURAN KINERJA

Yanti Murni, S.E., M.M.
Universitas Sumatera Barat

A. Pendahuluan

Pengukuran kinerja adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi sejauhmana organisasi atau individu mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja berperan penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan lembaga sektor publik menunjukkan bagaimana anggaran publik digunakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan untuk memberikan jaminan dari penggunaan sumber-sumber dana publik termasuk pengalokasian sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif melalui pelaksanaan manajemen publik yang baik (Sari, 2013).

Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk mengelola dan mengarahkan organisasi menuju kesuksesan. Dengan melihat secara objektif pada kinerja saat ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat, organisasi dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan daya saing mereka di pasar. Menurut (Biduri, 2018), dalam organisasi sector public pengukuran kinerja terutama dilakukan untuk mengukur tingkat 3E, yaitu:

1. Ekonomis
2. Efisiensi
3. Efektivitas (*value for money*)

2. Kedua, kinerja lembaga negara berbasis anggaran. Pertanyaan ini mengacu kepada semua pengeluaran negara (biaya belanja) terhadap hasil yang ingin dicapai (indikator kinerja) dapat dipertanggungjawabkan dan diketahui oleh masyarakat maupun warga negara.
3. Ketiga, kinerja lembaga negara berbasis pengawasan. Ini merujuk kepada terciptanya check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya mewujudkan *good governance*, secara epistemologi hanya mampu diimplementasi dalam lima prinsip yang universal, yaitu: responsibility, accountability, fairness, independency and transparency. Strategi mendorong akuntabilitas dan transparansi kinerja lembaga negara untuk mencapai *good governance* dapat dilakukan melalui memperkuat basis penunjang instrument kinerja lembaga negara, memperkuat anggaran berbasis kinerja dan pengawasan kinerja lembaga negara.

D. Daftar Pustaka

- Akbar, R. (2018). Pengukuran Kinerja dan Akuntabilitas Publik di Indonesia Studi Awal di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Akuntabilitas Publik*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jaap.35332>
- Anggraini, A. M., Sari, R. M., & Fristiani, N. (2020). Implementasi Metode Balanced Scorecard Sebagai Tolok Ukur Pengukuran Kinerja Pada Organisasi Sektor Publik. *Jca (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 1(2), 58. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v1i2.1399>
- Biduri, S. (2018). Akuntansi Sektor Publik. In *Akuntansi Sektor Publik* (Issue August). <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-1>
- Jefri, R. (2018). Teori stewardship dan good governance. *Jurnal Riset Edisi XXVI*, 4(3), 14–28. <https://economicsbosowa.unibos.id/index.php/eb/article/view/162>
- Maharani, Y., & Sari, R. (2021). Konsep Value For Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi

- Pangkalpinang. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(1), 97.
<https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1919>
- Mansyur, A. R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Dinamika Pembelajaran Di Indonesia. *Education and Learning Journal*, Vol. 1, No, 113-123.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1), 1-10.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974>
- Sari, M. R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Faktor Organisasional, Dan Penggunaan Sistem Pengukuran Kinerja Terhadap Kinerja Organisasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 117-141.
<https://doi.org/10.21002/jaki.2016.07>
- Sari, N. C. F. (2013). *Prinsip Value for Money (Study Kasus Kabupaten Sumenep Tahun 2010-2013)*. 1-25.
- Skudiene, V., & Auruskeviciene, V. (2012). The contribution of corporate social responsibility to internal employee motivation. *Baltic Journal of Management*, 7(1), 49-67.
<https://doi.org/10.1108/17465261211197421>
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2015). Hubungan karakteristik pegawai pemerintah daerah dan implementasi sistem pengukuran kinerja: Perspektif ismorfisma institusional. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(2), 153-173.
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss2.art6>
- Sofyani, H., Ulum, I., Syam, D., & Wahjuni, S. L. (2012). Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia). *JDA Jurnal Dinamika Akuntansi*, 4(1), 36-46. <http://journal.unnes.ac.id/index.php/jda>
- Ulum, I. (2013). Model Pengukuran Kinerja Intellectual Capital Dengan Ib-Vaic Di Perbankan Syariah. *Inferensi*, 7(1), 185.
<https://doi.org/10.18326/infl3.v7i1.185-206>
- Wartick, S. L., & Cochran, P. L. (1985). The Evolution of the Corporate Social Performance Model. *Academy of Management Review*, 10(4), 758-769.
<https://doi.org/10.5465/amr.1985.4279099>
- Yulitiawati, Y., & Rusmidarti, R. (2021). Analisis Pengukuran

Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU. *Jetap*, 91-109.

<http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966><https://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>

E. Tentang Penulis



Yanti Murni, S.E., M.M.
Universitas Sumatera Barat

Penulis lahir di Kp. Pili tanggal 07 Februari 2023. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Jurusan Manajemen. Motivasi penulis dalam membuat *book chapter* ini adalah dalam rangka proses pembelajaran. *Book chapter* ini merupakan karya pertama penulis dalam bentuk buku yang ber ISBN.

BAB 7

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN

Chairani Adelina, S.E., M.Si.
Universitas Prabumulih

A. Pendahuluan

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban serta menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan (Suwanda, Elsy & Meiyenti, 2020). Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas kauntansi yang menurut laporan ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Selain itu laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 menyatakan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah tmenetapkan Peraturan

pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

Unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendahara umum negara/daerah dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah. Entitas pelaporan pemerintah pusat juga menyajikan Saldo Anggaran Lebih pemerintah yang mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

H. Kesimpulan

Saat ini laporan keuangan pemerintah pusat disusun berdasarkan penerapan akuntansi basis akrual berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP disusun oleh suatu komite yaitu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP bertugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang SAP sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, KSAP melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Menteri Keuangan. KSAP bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri Keuangan RI.

I. Daftar Pustaka

- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* Jakarta: Pemerintah Indonesia.

Suwanda, Dadang. Elsyne Rosmery & Meiyenti, Ira. (2020).
Teknis Penyusunan Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya

J. Tentang Penulis



Chairani Adelina, S.E., M.Si.
Universitas Prabumulih

lahir di Prabumulih Sumatera Selatan pada 20 April 1992. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Prabumulih. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya pada tahun 2015 dan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi BKU Akuntansi Universitas Sriwijaya pada tahun 2021. Penulis aktif melaksanakan tridarma perguruan tinggi pada Program Studi Akuntansi Universitas Prabumulih. Mata kuliah yang diampu penulis adalah Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Pemerintah, Akuntansi Desa, dan Perpajakan.

BAB 8

AUDIT SEKTOR PUBLIK

**Dr. Payamta, CPA, M.Si., Ak. CA, CPI, CGRPCA, CRA, CRP,
Asean CPA
FEB UNS**

A. Pendahuluan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami dan menjelaskan kembali tentang:

1. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menjelaskan konsep pemeriksaan keuangan negara, termasuk tujuan, proses, dan peran lembaga pemeriksa yang berwenang.
2. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat mengidentifikasi ruang lingkup pemeriksaan keuangan negara, termasuk entitas-entitas yang menjadi obyek pemeriksaan dan jenis-jenis audit yang dilakukan.
3. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menjelaskan standar pemeriksaan keuangan negara yang digunakan oleh auditor, termasuk peraturan dan pedoman yang mengatur pelaksanaan pemeriksaan.
4. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis pemeriksaan keuangan negara, seperti pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
5. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat membandingkan dan menjelaskan perbedaan antara pemeriksaan keuangan negara dan pemeriksaan keuangan sektor swasta, termasuk perbedaan tujuan, ruang lingkup, dan regulasi yang mengatur.

- Mengaudit sistem kontrol intern terkait dengan penyusunan laporan keuangan.
- Memberikan pendapat profesional atas kelayakan dan kepatutan laporan keuangan yang diaudit.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan proses bisnis entitas.

Auditor eksternal bertanggung jawab kepada pihak yang memberikan mandat auditor, misalnya pemegang saham atau pemerintah.

Auditor internal maupun auditor eksternal memegang peran penting dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan keuangan dan operasional organisasi sektor publik. Kolaborasi antara keduanya juga bisa terjadi untuk memaksimalkan keefektifan dan efisiensi audit sektor publik.

J. Daftar Pustaka

- Adi Suharsono, "The Role of Public Accountants in Government Performance Audit: Evidence from Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Volume 22, Nomor 2, 2018.
- Anwar, M., & Lako, A. (2016). "The Role of Auditors in Ensuring Accountability and Transparency in the Public Sector: Lessons from Indonesia." *Asian Journal of Accounting and Governance*, 7, 1-11.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI): Situs web: <https://www.bpk.go.id/>
- Buehler, S. G., & Stein, D. L. (Eds.). (2018). "Public Procurement Auditing: Challenges and Opportunities." Routledge.
- Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA): Situs web: <https://www.cipfa.org/>
- Djakman, F. A., & Mutia, A. (2016). "Auditing Local Government Financial Statements: Lessons from Indonesia." *International Journal of Business and Social Science*, 7(8), 109-114.
- Fitriany, H., & Abidin, S. (2019). "Public Sector Auditing and Financial Accountability: A Comparative Study of

- Indonesia and Malaysia." *Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice*, 2019(1), 1-15.
- Government Accountability Office (GAO): Situs web: <https://www.gao.gov/>
- Government Auditing Standards (The Yellow Book): Situs web: <https://www.gao.gov/yellowbook>
- Hota, S. (2018). "Probity Audits: A Tool to Enhance Good Governance in Public Procurement." *International Journal of Public Sector Management*, 31(4), 478-490.
- Institute of Internal Auditors (IIA): Situs web: <https://global.theiia.org/>
- International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB): Situs web: <https://www.iaasb.org/>
- International Federation of Accountants (IFAC): Situs web: <https://www.ifac.org/>
- International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI): Situs web: <https://www.intosai.org/>
- International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI): Situs web: <https://www.issai.org/>
- Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management (JPBAFM)
- Khusnul Fathiyah, "The Role of External Auditors in Public Sector Accountability: Evidence from Indonesia," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 7, Nomor 3, 2016.
- Michalczyk, A., & Czechowski, M. (2017). "Public Sector Procurement Audit: A Review of Issues and Practices." *Journal of Management and Financial Sciences*, 10(33), 131-149.
- Oti, W. A. (2016). "Auditing Public Procurement: A Theoretical Framework." *Journal of Public Procurement*, 16(2), 127-148.
- Patricia Arnold, "Auditing the Public Sector: Towards a Theory of Comparative Audit," *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, Volume 4, Nomor 2, 2016.
- Prasetio, A. B., & Jabeen, S. (2018). "Challenges and Opportunities in Auditing the Public Sector: Evidence from Indonesia." *Journal of Accounting and Auditing: Research & Practice*, 2018(1), 1-17.

Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB): Situs web: <https://www.pcaobus.org/>

Sari, D. M., & Dahelmi, D. (2018). "The Role of Auditors in Public Sector Financial Reporting: Evidence from Indonesia." *International Journal of Business and Society*, 19(3), 771-786.

The Institute of Internal Auditors (IIA): Situs web: <https://www.theiia.org/>

United States Government Accountability Office (U.S. GAO): Situs web: <https://www.gao.gov/>

World Bank Group (2015). "Auditing Public Procurement: A Guide for Practitioners." Situs web: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/21673>

Yusuf Wibisono, "Public Sector Auditing and Accountability in Indonesia: Challenges and Opportunities," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 3, 2017.

Zdravković, A., & Đorđević, B. (2017). "Audit of Public Procurement." *Facta Universitatis, Series: Economics and Organization*, 14(1), 1-13.

K. Tentang Penulis



**Dr. Payamta, CPA., M.Si., Ak., CA., CPI., CGRPCA., CRA.,
CRP., Asean CPA.
FEB UNS**

Penulis adalah Dosen Jurusan Akuntansi FEB UNS. Anggota Pimpinan Satuan Pengawas Intern UNS (2020-Sekarang). Penulis aktif mengajar di Program S1 Akuntansi, Program Magister Akuntansi dan Magister Manajemen, serta Program Doktor Ilmu Ekonomi FEB UNS. Aktif mengajar dan meneliti sejak tahun 1992. Mata Kuliah yang diampu di

antaranya Bidang Auditing dan Riset Auditing, Akuntansi Sektor Publik, Audit Keuangan Negara, dan Teori Akuntansi, Akuntansi & Pelaporan Berkelanjutan (APK). Penulis adalah alumni dari SMN 2 Klaten (1986), Lulus Program Sarjana Akuntansi FEB UNS (1991), Lulus Program Magister Sains Akuntansi UGM (1998) dan Lulus Doktor dari Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Diponegoro (2009). Lulus dari Pendidikan Profesi Akuntan Publik dengan sebutan *Certified Public Accountant* (CPA) dari IAPI (2009); *Certified Professional Investigator* (IAPI: 2017); *Chartered Accountant* (IAI: 2010), Lulus Sertifikasi bidang Manajemen Risiko (CRA & CRP, 2020). Setiap tahun minimal memperoleh 40 Satuan Kredit Poin dari keikutsertaan dalam Pendidikan Profesi Berkelanjutan IAPI. Sebagai seorang praktisi Akuntan Publik dan sekaligus Pendiri dan Pemilik dari Kantor Akuntan Publik Dr. Payamta, CPA (2010). Ketua Pengawas Auditor Indonesia (PAI) Solusi Manajemen Nusantara (2021-Sekarang). Penulis tercatat sebagai auditor bank pada Bank Indonesia (2012) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Auditor terdaftar pada Badan Pemerikas Keuangan (2013-sekarang). Penulis aktif sebagai Konsultan Badan Layanan Umum dari berbagai Rumah Sakit dan Puskesmas. Beberapa buku yang pernah ditulis diantaranya: Buku Auditing, Auditing Internal Berbasis Risiko, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berkelanjutan (APK), Akuntansi Pemerintahan, Panduan Accurate Accounting Software untuk Usaha Dagang, Koperasi dan Aspek Akuntansinya.

BAB 9

AKUNTANSI UNTUK TEMPAT IBADAH

Ferlinda Ainur Rachmani, S.E., M.Ak., Ak.

Dosen Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

A. Pendahuluan

Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan dapat memahami dan mampu tentang:

1. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menjelaskan akuntansi tempat ibadah.
2. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat mengidentifikasi ruang lingkup akuntansi tempat ibadah.
3. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat menyusun laporan keuangan tempat ibadah.
4. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat mengidentifikasi dan membedakan akuntansi tempat ibadah dengan akuntansi entitas lainnya.
5. Setelah mempelajari tema ini, peserta dapat membandingkan dan menjelaskan perbedaan antara akuntansi tempat ibadah dan akuntansi entitas lainnya.

B. Pengertian Akuntansi untuk Tempat Ibadah

Indonesia memiliki 6 (enam) agama yang setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Tempat ibadah merupakan tempat dilakukannya kegiatan inti yang mendekatkan antara manusia dengan Tuhan, sebagai contoh sholat dan berdo'a. Selain itu, di tempat ibadah juga sering dilakukan kegiatan sosial sebagai bentuk peduli terhadap sesama, contoh bakti sosial dan ceramah. Dengan adanya

D. Daftar Pustaka

- Halim, A., & Kusufi, M. (2014). Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45 Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba.
- Standar, D., Keuangan, A., Akuntan Indonesia, I., Laporan, P., & Entitas Berorientasi, K. (2018). Draf Eksposur ini diterbitkan oleh ISAK 35.

E. Tentang Penulis



Ferlinda Ainur Rachmani, S.E., M.Ak., Ak.

Dosen Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Lahir di Semarang, 06 Juni 1983. Penulis lulus Sarjana Ekonomi (S.E.) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta (STIE YKPN) pada tahun 2005, dilanjutkan dengan Pendidikan Profesi Akuntansi (Ak) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara Yogyakarta (STIE YKPN) pada tahun 2005, serta melanjutkan Program Pendidikan Pasca Sarjana Akuntansi (M.Ak.) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Putra (STIE Dharma Putra) yang diraih pada tahun 2018. Sejak tahun 2014 sampai sekarang penulis aktif sebagai praktisi akuntan dan mengabdikan pada Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Selain itu, penulis juga aktif sebagai tenaga pengajar di ITS NU Pekalongan. Sebagai salah satu penulis dalam buku ini, saya berharap besar semoga buku ini memiliki manfaat yang besar khususnya untuk para mahasiswa dan rekan akademisi yang menggeluti bidang Ilmu Akuntansi.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202397378, 20 Oktober 2023

Pencipta

Nama : **Kathleen Asyera Risakotta, Dwi Ekasari Harmadji dkk**
Alamat : Jl. Pattimura Lingkungan Soalanda RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Saparua, Kec. Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 97584, Saparua, Maluku Tengah, Maluku, 97584

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Kathleen Asyera Risakotta, Dwi Ekasari Harmadji dkk**
Alamat : Jl. Pattimura Lingkungan Soalanda RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Saparua, Kec. Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 97584, Saparua, Maluku Tengah, Maluku, 97584

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Akuntansi Sektor Publik**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 9 Oktober 2023, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dihitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000530333

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.